
MODEL UJIAN UNTUK MENENTUKAN KELULUSAN BAGI SISWA SMK

Oleh:
Endang Mulyatiningsih
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Siswa SMK disiapkan untuk menjadi tenaga kerja terampil, tetapi penentuan kelulusan siswa SMK ditetapkan dengan menggunakan nilai ujian nasional. Ujian atau pengukuran kemampuan siswa untuk menentukan kelulusan memberi dampak positif dan negatif, oleh sebab itu, artikel bertujuan untuk membahas model ujian yang ideal untuk menentukan kelulusan siswa.

Nilai ujian nasional telah digunakan untuk menetapkan kelulusan sejak tahun 2007. Selama perjalanan UN mulai tahun 2007 sampai sekarang, ujian nasional SMK telah mengalami perbaikan-perbaikan dengan menambah mata ujian Teori Kejuruan dan Uji Kompetensi. Namun demikian, penentuan kelulusan masih mengabaikan hasil-hasil penilaian selama siswa belajar di SMK. Oleh sebab itu dalam artikel ini dibahas: kelebihan dan kekurangan UN dan penentuan kelulusan yang ideal dengan mempertimbangkan nilai rapor.

Kata kunci: ujian nasional, praktik kejuruan, kelulusan SMK

A. PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidangnya. Tujuan yang tertera di atas sudah jelas, bahwa siswa yang belajar di SMK disiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten. Meskipun demikian, SMK tidak menutup peluang bagi lulusannya untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, tugas SMK menjadi ganda yaitu selain menyiapkan lulusan supaya dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten di industri, SMK juga dituntut untuk menyiapkan lulusan supaya dapat melanjutkan studi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan bila lulusan ingin berwiraswasta.

Direktur Pembinaan SMK, Joko Sutrisno (Kompas Com, 26 Januari 2010) memberi laporan bahwa pada tahun 2010, lulusan SMK yang memasuki pasar kerja sebesar 50 persen, dan sekitar 10 persen (80.000 - 90.000) lulusan SMK melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua lulusan SMK langsung memilih untuk bekerja sesuai dengan keahliannya dan sebagian lulusan SMK justru melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Supaya lulusan SMK dapat bersaing dengan lulusan sekolah menengah lainnya pada saat mencari pendidikan yang lebih tinggi, maka siswa SMK perlu dibekali dengan kompetensi yang berlaku umum untuk semua lulusan sekolah menengah.

Kegiatan belajar siswa SMA dan SMK berbeda. Kegiatan belajar siswa SMA lebih banyak dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas sedangkan kegiatan belajar siswa SMK dilakukan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industry. Jumlah jam belajar SMK ditetapkan dalam bentuk durasi waktu yang diperlukan untuk mencapai satu satuan kompetensi. Jumlah jam Kompetensi Kejuruan tidak boleh kurang dari 1044 jam. Melihat proporsi kegiatan belajar tersebut, kegiatan pembelajaran di SMK lebih didominasi oleh pengembangan skill psikomotorik sedangkan kegiatan pembelajaran di SMA didominasi oleh pengembangan kognitif.

Perbedaan proporsi kegiatan belajar siswa SMK dan SMA yang dipaparkan di atas menyebabkan perasaan tidak adil apabila syarat untuk memperoleh kelulusan ditetapkan dengan cara dan alat yang sama. Beban belajar siswa SMK yang lebih didominasi oleh mata pelajaran keterampilan menyebabkan pengembangan aspek kognitif siswa SMK menjadi kurang maksimal. Pada saat mata ujian nasional hanya dilakukan untuk mengukur aspek kognitif saja, maka siswa SMK banyak yang sulit untuk memenuhinya. Dengan kondisi yang demikian, penyamaan kebijakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan pada siswa SMA dan SMK yang hanya mengukur aspek kognitif saja menimbulkan banyak pertentangan.

Ujian nasional penting dilakukan agar prestasi belajar siswa dari satu sekolah dengan sekolah lainnya dapat dibandingkan. Namun jika alat ukur prestasi belajar yang digunakan sama, SMK mengalami kesulitan karena kedalaman materi yang diajarkan juga tidak sama. Sedangkan jika alat

ukur yang digunakan tidak sama, ujian nasional tidak dapat untuk membandingkan kemampuan lulusan sekolah yang satu dengan sekolah lainnya. Pada prakteknya, ujian nasional tidak menggunakan butir soal yang sama meskipun mata ujian yang diujikan sama.

Peserta didik (siswa) dinyatakan lulus atau tidak lulus apabila telah dapat memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) yang telah ditetapkan. SKL SMK dan SMA tentu saja berbeda karena kurikulum yang digunakan juga berbeda. BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) sebagai lembaga yang bertugas menetapkan standar pendidikan telah mengadakan perbaikan pada syarat-syarat yang digunakan untuk menentukan kelulusan. Jenis mata pelajaran yang diujikan di SMK pun terus mengalami perubahan. Pada awal diselenggarakan ujian nasional, mata pelajaran yang diujikan sama untuk semua sekolah yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mulai tahun 2007, mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional sudah ditambah dengan mata pelajaran yang mewakili keahlian masing-masing program studi. Ujian nasional dan syarat-syarat kelulusan siswa SMK tahun 2010 ini sudah realistik dengan menambahkan mata pelajaran Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan.

Keberhasilan seseorang dalam menempuh ujian dipengaruhi oleh banyak faktor. Ketika nilai ujian digunakan untuk menentukan kelulusan, maka terjadilah dampak positif dan negatif yang terus diperdebatkan. Melalui artikel ini dibahas, model ujian yang ideal untuk menentukan kelulusan bagi siswa SMK. Model ujian SMK yang diusulkan adalah model ujian yang mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk menentukan seorang siswa dinyatakan lulus, maka pengukuran prestasi belajar sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali saja. Ujian nasional dilaksanakan tetapi tidak menjadi satu-satunya alat penentu kelulusan.

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Ujian Nasional

Sistem evaluasi hasil belajar pada akhir sekolah mengalami beberapa kali pergantian. Pada tahun ajaran 2003/2004 Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) diganti dengan UN. Penggantian ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0153 tahun 2003. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 57 menyebutkan bahwa pemerintah diberi mandat untuk melakukan evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional baik terhadap peserta didik maupun terhadap lembaga pendidikan. SK Mendiknas Nomor 0153/2003 memutuskan bahwa penilaian akhir belajar siswa SMP/MTs dan SMA/SMK ditetapkan menggunakan ujian nasional.

Kebijakan ujian nasional terus diperkuat dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 4, menyatakan pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya pasal 63 ayat 1 menetapkan bahwa: penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru, satuan pendidikan dan pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui ujian nasional. Pada tahun pelajaran 2009/2010 ujian nasional bagi peserta didik SMK diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2009 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 75 tahun 2009. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 75 tahun 2009 dijelaskan pada pasal 7 bahwa Mata Pelajaran UN SMK meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan. Sejak ditetapkannya ujian nasional sebagai penentu kelulusan, mata ujian nasional telah mengalami penambahan dua kali, yaitu: pada tahun 2007, ujian nasional hanya ditetapkan untuk 3 mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada tahun 2008 mata ujian nasional ditambah dengan Praktik Kejuruan dan tahun 2010 ditambah dengan mata ujian Teori Kejuruan.

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan ujian mata pelajaran teori diatur dalam Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0024/SK-POS/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010, sedangkan untuk pelaksanaan Praktik Kejuruan diatur dalam Petunjuk Teknis. Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:

- a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya;
- b. khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.

2. Kelebihan dan Kekurangan UN

Setiap kebijakan yang menentukan nasib seseorang selalu menimbulkan dampak positif dan negatif. Demikian pula kebijakan ujian nasional yang digunakan untuk menentukan kelulusan. Penentuan kelulusan siswa melalui mata pelajaran yang di-Ebtanas-kan berdampak negatif pada mata pelajaran lain kurang dihargai. Penentuan kelulusan menggunakan ujian non standar seperti UAS (Ujian Akhir Sekolah) tidak dapat digunakan sebagai standar mutu untuk mengukur kinerja sekolah yang satu dibandingkan dengan kinerja sekolah lain karena alat ukur yang digunakan tidak sama.

Hasil kajian dampak ujian nasional yang digunakan untuk menetapkan kelulusan diambil contoh dari beberapa negara lain. Menurut tulisan Nicole (2004: 1-5), penggunaan tes standar seperti ujian nasional untuk penentuan kelulusan telah mengalami penurunan grade *de(grading)*. yang meliputi penurunan hasil, proses belajar, dan penilaian pendidikan. Tes standar mengalami penurunan dalam mengevaluasi kualitas hasil belajar karena pertanyaan/soal tertutup dari informasi lain yang dapat digunakan untuk mengetahui kematangan siswa. Tes standar juga mengurangi kualitas proses belajar karena guru bekerja lebih keras hanya untuk menjamin kesuksesan siswa pada tes yang diselenggarakan. Sukses dalam menempuh ujian lebih penting dari pada sukses dalam menempuh pelajaran. Siswa dapat sangat sukses dalam pelajaran yang diujikan tetapi belum tentu dapat berpikir kreatif, berkomunikasi efektif dan bekerja kolaboratif.

Alfie Kohn (Nicole: 2004: 1-5) mengkritik standardisasi testing tidak fair sebab pertanyaan-pertanyaan menuntut satu set pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak dari latar belakang yang berbeda-beda. Kualitas sekolah, wilayah geografis, kemampuan siswa dan guru yang berbeda-beda menyebabkan ujian nasional mudah dicapai dan lebih menguntungkan bagi sekelompok sekolah yang maju tetapi sulit dicapai dan berat dijalani oleh sekolah yang belum maju.

Roderick (2002: 333-357) menemukan kondisi yang berlawanan dengan studi tentang kekurangan tes standar di atas. Pemerintah membuat kebijakan baru untuk mengakhiri promosi sosial bagi sekolah yang akuntabilitasnya rendah di Chicago melalui program *Chicago's high-stake test* pada grade ke 3, 6 dan 8. Kebijakan ini dilakukan untuk memperpendek waktu sekolah siswa yang mampu karena mereka dapat menyelesaikan studi lebih cepat dari waktu yang disediakan. Berdasarkan hasil penelitian *longitudinal* yang mengevaluasi kebijakan *high-stake* di Chicago, skor siswa secara kumulatif meningkat melebihi skor tes yang diprediksikan dalam kemampuan membaca. Dua pujian yang patut diberikan pada kebijakan tersebut adalah: (1) Kebijakan dapat meningkatkan skor tes siswa pada tahun tersebut ketika siswa mempersiapkan tes promosi; (2) Siswa dan sekolah yang mempunyai kemampuan rendah dapat ditingkatkan secara maksimal. Hasil penelitian kebijakan *high-stake testing* dapat meningkatkan prestasi siswa yang rendah sebab mereka terdorong untuk bekerja keras dan menuntut guru untuk lebih meningkatkan perhatiannya pada proses pembelajaran siswa.

Hasil ujian nasional di Indonesia tidak stabil untuk semua mata pelajaran. Nilai rata-rata hasil UN matematika SMK mengalami peningkatan dari 6,61 pada tahun 2006 menjadi 6,92 pada tahun 2007 dan 7,47 pada tahun 2008/2009. Sementara itu nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris SMK mengalami penurunan yaitu dari 7.39 pada tahun 2006 menjadi 6.7 pada tahun 2007 dan 2008. Angka kelulusan ujian nasional (UN) mengalami peningkatan dari 92,10% pada tahun 2006 menjadi 93,34% pada tahun 2007 dan 96,51% pada tahun 2008/2009. Hasil UN SMK tahun 2007 menunjukkan jumlah siswa yang mendapat nilai antara 4,01 – 4,99 sebesar 6,83% pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan 6,8% pada mata pelajaran Matematika (Laporan Hasil Ujian Nasional 2007, www.puspendik.com). Pada tahun 2008/2009, jumlah siswa yang mendapat nilai antara 4,01 – 4,99 tersesar sebanyak 10,58 pada pelajaran Bahasa Indonesia.

Dampak positif ujian nasional, usaha yang dilakukan siswa adalah 84% memperbanyak latihan soal, menurut pendapat guru 87% siswa lebih semangat belajar. Dampak positif UN bagi guru adalah 82% guru lebih semangat mengajar sedangkan bagi sekolah adalah menambah jam belajar dan

memberi perhatian khusus pada pokok bahasan yang sulit. Dampak negatif UAN menurut kepala sekolah adalah 91% orangtua siswa menjadi cemas. Mata pelajaran yang dianggap sulit menurut Kepala Sekolah 95% Bahasa Inggris dan 75% Matematika. Menurut siswa, mata pelajaran yang dianggap sulit adalah Matematika penyebab sulitnya mata ujian: 73% mata pelajaran sulit (Djemari Mardapi, 2004: 27-41)

Ujian nasional berdampak pada proses pembelajaran. Permasalahan yang muncul di lapangan seputar ujian nasional pada proses pembelajaran tahun 2007 antara lain: cakupan mata pelajaran (mapel) yang diujikan hanya tiga mata pelajaran untuk setiap jurusan. Fakta di lapangan menunjukkan banyak sekolah yang hanya mengkonsentrasikan diri pada mata pelajaran UN. Semua sekolah menyiapkan diri menyambut UN dengan mengadakan pengayaan untuk mapel UN pada sore hari. Keadaan tersebut tidak menguntungkan bagi pengembangan sains karena UN tidak memasukkan mapel sains seperti Fisika, Kimia dan Biologi. Ketiadaan hubungan antara mapel sains dengan UN menyebabkan sekolah lebih memilih mengabaikan keberadaan ketiga mapel tersebut.

Kebijakan UN tahun 2008 telah diperbaiki dengan menambahkan jumlah mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Mata Pelajaran UN SMA Program: (1) IPA, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi; (2) IPS, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi; (3) Program Bahasa meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Asing lain yang diambil, Sejarah Budaya (Antropologi), dan Sastra Indonesia. Mata Pelajaran UN MA/Program Keagamaan meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Tasawuf/Ilmu Kalam. Mata Pelajaran UN SMK, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Kompetensi Keahlian Kejuruan. Standar kelulusan kompetensi keahlian kejuruan minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN

Hasil poling Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007 memperoleh temuan tanggapan masyarakat yang menyetujui pemanfaatan hasil ujian nasional untuk penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/satuan pendidikan (54,5%), sedangkan pada tahun 2008 pendapat masyarakat yang menyetujui UN sebagai penentu kelulusan meningkat menjadi 63,5% dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 66,3%. Hasil poling ini menunjukkan bahwa masyarakat sedikit demi sedikit mulai dapat menerima kebijakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan setelah pemerintah juga memperbaiki kebijakan ujian nasional tersebut dengan memberi solusi bagi siswa yang tidak lulus ujian nasional. Pada tahun 2007, UN hanya ditetapkan pada 3 mata pelajaran dan tidak ada solusi bagi siswa yang tidak lulus. Tahun 2008 mata ujian UN sudah ditambah dan disertai dengan solusi bagi siswa yang tidak lulus. Tahun 2010, mata ujian UN SMK ditambah dengan Teori Kejuruan dan Uji Kompetensi. Nilai ujian kompetensi minimal adalah 7.00 dan nilai ini dapat dimasukkan untuk menghitung nilai rerata UN sehingga bagi siswa yang tidak mampu pada salah satu mata ujian UN masih dapat tertolong oleh nilai ujian kompetensi.

Berdasarkan kajian terhadap UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional, terdapat beberapa kesenjangan yaitu: UN hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan yakni aspek kognitif, padahal menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 UU Sisdiknas, kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, UN hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik, padahal menurut pasal 57 UU Sisdiknas, mutu pendidikan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang mencakup peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.

UN mengabaikan muatan kurikulum yang menganut prinsip kemajemukan potensi daerah dan peserta didik. Menurut pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas, kurikulum harus dikembangkan dengan menggunakan prinsip kemajemukan (diversifikasi) potensi daerah dan potensi peserta didik. UN telah mengurangi kewenangan pendidik/guru dan sekolah untuk melakukan evaluasi hasil belajar dan menentukan kelulusan peserta didik. Menurut pasal 58 ayat 1 dan pasal 61 ayat 2 UU Sisdiknas, evaluasi hasil belajar dan penentuan kelulusan peserta didik dilakukan oleh pendidik/guru dan satuan pendidikan/sekolah.

Konskuensi logis terhadap guru mata pelajaran lain yang tidak diujikan secara nasional secara psikologis merasa dimarjinalkan. Guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional merasa tidak ada tuntutan akuntabilitas, tidak ada dukungan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena sekolah lebih mengutamakan untuk meraih target kelulusan siswa.

Secara psikologis, bila ada salah satu mapel yang gagal siswa memandang kehidupannya sudah gagal, padahal siswa masih dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

3. Penentuan Kelulusan yang Ideal

Siswa SMK menempuh pelajaran selama tiga sampai dengan empat tahun. Selama waktu tersebut, telah banyak dilakukan penilaian-penilaian dari guru di sekolah. Selain penilaian dari guru, siswa SMK juga mengikuti ujian kompetensi untuk memperoleh sertifikat keahlian untuk memasuki bidang pekerjaan tertentu. Sertifikat kompetensi ini dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi). Asesor sertifikasi kompetensi terdiri dari guru sekolah, industri dan LSP itu sendiri. Dengan banyaknya penilaian yang telah dilewati siswa selama belajar di SMK, maka penentuan kelulusan siswa juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Tentu saja, penentuan kelulusan lebih adil apabila dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran ganda.

Menurut Ki Gunawan (2003: 1) evaluasi lebih bermakna apabila dilaksanakan terus-menerus, komprehensif, dan berkelanjutan terhadap kemampuan siswa selama belajar di sekolah. Penilaian yang dilakukan secara komprehensif mencakup aspek kompetensi akademik dan kecakapan hidup. Dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, penilaian secara komprehensif menjadi sangat penting karena siswa baru dapat dinyatakan kompeten apabila telah memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Dalam penilaian kompetensi dikenal asesmen alternatif, asesmen otentik atau asesmen kinerja. Assesmen alternatif digunakan untuk memberi penilaian kinerja (*performance assessment*) atau hasil belajar peserta didik secara multidimensional pada situasi nyata (otentik). Assesmen ini dilaksanakan dengan cara mengobservasi dan mengevaluasi suatu proses, kinerja, perilaku di mana dalam proses tersebut akan muncul keterampilan, sikap, dan produk secara bersama-sama. Berdasarkan pengertian asesmen alternative, maka *performance assessment* dan *personal communication assessment* termasuk pada kategori *alternative assessment*. Dua alat asesmen tersebut memiliki ciri-ciri pengukuran secara langsung (*direct*) dan autentik terhadap hasil pembelajaran.

Objek *performance assessment* (asesmen kinerja) ini adalah segala sesuatu kemampuan yang dapat diobservasi. Kinerja tidak harus berwujud keterampilan tetapi bisa berupa penyampaian gagasan yang membutuhkan proses kognitif yang kompleks seperti: menganalisis masalah, memecahkan masalah, melakukan percobaan, membuat keputusan, mengukur, bekerja sama dengan teman lain, membuat produk (benda, barang, jasa), dll. Assesmen alternatif dapat juga digunakan untuk menilai kebiasaan berpikir (*habit of mind*), cara bekerja, nilai-nilai moral dan perilaku peserta didik dalam kehidupan nyata.

Penilaian dilakukan terus menerus dan berkelanjutan yang mengacu pada paradigma pengukuran kemampuan individu yang kurang akurat apabila hanya dilakukan dengan satu alat dan satu kali pengukuran saja. Penilaian yang berkelanjutan dapat membuktikan konsistensi kemampuan seseorang. Beberapa asumsi yang mendasari pernyataan tersebut antara lain: (1) sistem penilaian yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dapat mengukur kemampuan siswa secara lebih komprehensif; (2) alat penilaian ganda dan berkelanjutan yang reliabel atau sudah menunjukkan hasil konsisten dapat menjadi alat evaluasi keberlanjutan siswa yang akurat; dan (3) kemampuan siswa setelah lulus atau meninggalkan kelas sudah dapat diprediksi berdasarkan hasil penilaian ganda yang berkelanjutan

Penilaian berkelanjutan menggunakan pendekatan pengukuran ganda. Baker, (2003: 13) mengamati bahwa pengukuran ganda (*multiple measures*) menjadi bagian kebijakan yang telah direkomendasikan dalam banyak sistem penilaian atau akuntabilitas pendidikan. Pengukuran ganda bertujuan untuk mengurangi pengaruh kesalahan pengukuran yang tidak pantas dalam pembuatan keputusan tentang status siswa. Montero (2003: 8) dalam jurnal yang sama memberi contoh pengukuran ganda misalnya: menggunakan wilayah isi sama atau berbeda (seperti membaca, matematika); menggunakan perbedaan tipe informasi penilaian (seperti acuan norma, acuan kriteria, penilaian kinerja, skor tes buatan guru, dan penilaian portofolio kelas); atau menggunakan perbedaan tipe butir (seperti selected-response [SR], constructed-response [CR], performance assessments [PA], dan portofolio). Pengukuran ganda dapat juga melibatkan pengukuran nonkognitif seperti kehadiran atau partisipasi di sekolah dan aktivitas di masyarakat.

Menurut beberapa teori yang telah dipaparkan di atas dapat direkomendasikan bahwa penentuan kelulusan siswa SMK sebaiknya menggunakan model pengukuran ganda. Pada tahun 2010 ini, penentuan kelulusan siswa SMK setidaknya sudah menggunakan beberapa alat pengukuran. Namun demikian, prestasi siswa selama belajar di SMK belum diperhitungkan. Oleh sebab itu, untuk menentukan kelulusan siswa SMK, sebaiknya juga mempertimbangkan nilai rapor dan nilai-nilai kompetensi lain yang mendukung.

C. PENUTUP

Setiap kebijakan penilaian dan evaluasi pada akhir masa studi mempunyai kekurangan dan kelebihan. Penentuan kelulusan dengan tes standar nasional telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan tetapi tes standar masih tetap diperlukan untuk pengendalian mutu pendidikan. Penentuan kelulusan siswa dengan menggunakan satu alat dan satu kali pengukuran saja melalui tes standar dianggap tidak adil terutama bagi siswa yang tidak dapat mengikuti ujian secara maksimal.

Pada saat ini, penggunaan pengukuran ganda (*multiple measurement*) telah berkembang menjadi perspektif baru dalam dunia pendidikan. Menurut Montero (2003: 8) pendekatan pengukuran ganda berusaha untuk meningkatkan reliabilitas dengan cara menurunkan sejumlah kesalahan yang berhubungan dengan evaluasi pada siswa, guru, sekolah dan *local educational agency* (LEAs). Pendekatan pengukuran ganda telah diimplementasikan pada penentuan kelulusan siswa SMK pada tahun 2010. Namun demikian, penentuan kelulusan ini masih mengabaikan penilaian yang telah dilakukan selama siswa belajar di SMK. Oleh sebab itu, melalui artikel ini direkomendasikan hasil-hasil penilaian lain seperti nilai rapor dan nilai ujian kompetensi untuk dipertimbangkan dalam penentuan kelulusan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, B. D., & Nimz R. F., (2004). State policies and equal opportunity: The example of gifted education. *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Spring 2004, Vol. 26, No. 1. pp. 39-64.
- Djemari Mardapi. (2004). Dampak ujian akhir nasional. *Laporan Penelitian*. Jakarta: Puspendik Balitbang Diknas
- Ki Gunawan. (2002). UAN dalam perspektif desentralisasi pendidikan. *Pendidikan Network*. Diambil pada tanggal 14 Maret 2005 dari <http://Lwww.depdiknas.go.id>
- Montero, D. H., Julian, M. C., & Yen, W. M. (2003). Multiple measures: Alternative design analysis models. *Educational Measurement: Issues and Practice*. Summer 2003. pp 7 – 12
- Nicola, S. E. (2004). *(De)grading the standardized test: Can standardized testing evaluate school? Education in Canada*. Toronto. Summer, 2004. Vol. 44. Iss 3. pg 37. Diambil pada tanggal 5 Mei 2005 dari <http://proquest.umi.com/pqdweb>.
- Roderick, M., Jacob, B. A., & Bryk, A. S. (2002). The impact of high-stakes testing in Chicago on student achievement in promotional gate grades. *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Winter 2002, Vol. 24, No. 4, pp. 333-357.